

ACFTA (ASEAN -CHINA FREE TRADE AREA): MENGUNTUNGGAN ATAU MERUGIKAN INDONESIA ? DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEOLIBERALISME

Sinta Julina, S.Sos., M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jayabaya

E-mail : sinta.delta7@gmail.com

ABSTRACT

The background of the research is that globalization causes rapid changes in various dimensions in international relations, so that countries in the world absolutely must cooperate between countries. Similarly with countries in Southeast Asia (ASEAN) and China, they believe that international cooperation can provide strength to face regionalism and economic blocs.. Therefore they agreed to carry out free trade cooperation ACFTA then inaugurated the free trade of ASEAN and China in January 2010. In November 2018 President Joko Widodo finally ratified the "Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between ASEAN and the People's Republic of China (2015). Then the ACFTA which was signed on November 12, 2017, was implemented on August 1, 2019 (Upgrading Protocol ACFTA). ACFTA is a regional free trade agreement agreed by ASEAN member countries and China. ACFTA is an agreement between ASEAN member countries and China to create a free trade area by eliminating or reduce barriers to trade in goods, both tariff and non-tariff, increase market access for services, investment rules and regulations. Even though it's already implementation of the ACFTA is still causing differences of opinion. Many are optimistic about accepting the implementation of ACFTA as something beneficial. However, not a few are also skeptical and pessimistic about the implementation of ACFTA because it is seen as detrimental to Indonesia. The purpose of this study is to examine whether ACFTA benefits or harms Indonesia? from the perspective of neoliberalism. To analyze and answer the formulation of the problem, the author uses the Neoliberalism Perspective. Neoliberalism is one of the derivative variants of the liberalism perspective as the main competitor of the neorealism perspective. There are four derivatives of the liberalism perspective, namely republican liberalism, sociological liberalism, interdependent liberalism or commercial (interdependence/commercial liberalism), and institutional liberalism (institutional liberalism). This last variant is also called neoliberal institutionalism or better known as neoliberalism (neoliberalism). In applying the results of the study, the author uses a descriptive type of research. Data collection methods used are document-based methods (document-based research) or internet-based research methods. This study used qualitative data analysis methods. The results of this study are viewed from the perspective of Neoliberalism, ACFTA has proven to be profitable for Indonesia.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian adalah globalisasi menyebabkan perubahan yang begitu cepat di berbagai dimensi dalam hubungan internasional maka negara-negara di dunia mutlak untuk melakukan kerjasama antar negara. Begitupula dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan China, mereka berkeyakinan bahwa dengan kerjasama internasional dapat memberikan kekuatan untuk menghadapi regionalisme dan blok-blok ekonomi. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk melakukan kerjasama perdagangan bebas ACFTA (*ASEAN -China Free Trade Area*) maka diresmikanlah perdagangan bebas ASEAN dan China pada Januari 2010. Pada November 2018 Presiden Joko Widodo melakukan ratifikasi terhadap "*Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between ASEAN and the People's Republic of China (2015)*". Kemudian ACFTA yang telah ditandatangani pada tanggal 12 November 2017, diimplementasikan pada tanggal 1 Agustus 2019 (*Upgrading Protocol ACFTA*). ACFTA merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas regional yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN dan China. ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi. Walaupun sudah dilaksanakan pemberlakuan ACFTA tersebut masih menimbulkan perbedaan pendapat. Banyak yang berpendapat optimis menerima pemberlakuan ACFTA sebagai sesuatu hal yang menguntungkan. Namun tidak sedikit pula yang skeptis dan pesimis terhadap pemberlakuan ACFTA karena dipandang merugikan Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Apakah ACFTA menguntungkan atau merugikan Indonesia? ditinjau dari Perspektif Neoliberalisme. Untuk menganalisis dan menjawab rumusan permasalahan penulis menggunakan perspektif Neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan salah satu varian turunan dari perspektif liberalisme sebagai pesaing utama perspektif neorealisme. Ada empat turunan dari perspektif liberalisme yaitu liberalisme republikan (*republican liberalism*), liberalisme sosiologi (*sociological liberalism*), liberalisme interdependen atau komersial (*interdependence/commercial liberalism*), dan liberalisme institusional (*institutional liberalism*). Varian terakhir ini juga disebut neoliberal institutionalism atau lebih dikenal dengan neoliberalisme (*neoliberalism*). Dalam menerapkan hasil penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode berbasis dokumen (*document -based research*) atau metode berbasis internet (*internet-based research*). Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah ditinjau dari Perspektif Neoliberalisme, ACFTA terbukti menguntungkan Indonesia

PENDAHULUAN

Pembentukan ACFTA merupakan perjanjian perdagangan yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan juga China. Salah satu tujuan membentuk ACFTA adalah untuk menjadikan kawasan perdagangan bebas dengan mengurangi hingga menghilangkan hambatan dalam perdagangan, baik hambatan tarif maupun non-tarif menjadi 0%. Selain itu juga untuk membuka akses pasar jasa dan juga investasi untuk meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan negara yang bergabung di dalam ACFTA.¹ Awal kerjasama perdagangan dalam skema Free Trade Area antara China dan ASEAN tidak baru saja dimulai saat menggalakan pembentukan ACFTA. Kerjasama itu sendiri diawali dengan ikut bergabungnya China di dalam *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) pada tahun 1991 sebagai salah satu mitra dialog ASEAN.²

AMM sendiri membahas berbagai isu, seperti isu ekonomi, isu politik dan juga isu keamanan. Pada tahun 1997, China mulai berperan aktif untuk ikut terlibat dalam hubungan kerjasama antara ASEAN dan juga tiga negara Asia Timur yaitu Jepang, China dan Korea Selatan, yang disebut ASEAN+3 (*APT*). KTT +3 pertama kali dilaksanakan pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, di mana pada saat itu kawasan Asia sedang mengalami krisis ekonomi.³ Pembentukan *APT* digagas oleh Presiden Korea Selatan saat itu, Kim DaeJung, yang memberikan saran untuk memperluas anggota kelompok kawasan ekonomi bersama Jepang, China dan Korea Selatan dalam ASEAN+3. Tujuan pembentukan ASEAN+3 juga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian ASEAN yang pada tahun 1997 hampir seluruh negara-negara ASEAN mengalami krisis ekonomi.⁴ Terbangunnya hubungan baik antara ASEAN dan China dalam ASEAN+3 juga berdampak baik terhadap hubungan masa depan keduanya. Hubungan antara ASEAN dan China mulai ditingkatkan lagi dengan membentuk kerjasama yang lebih komprehensif dibidang ekonomi dalam sebuah kerjasama perdagangan bebas yang disebut ACFTA.⁵

Pembentukan ACFTA diawali dengan penandatanganan *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* oleh perwakilan kepala negara dari anggota ASEAN dan juga China pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. ingin memulai hubungan yang semakin kuat dalam bidang Cina merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi dunia, dan bersama dengan dua negara Asia Timur lainnya yaitu Jepang dan Korea Selatan telah menjadi mitra dagang terpenting Indonesia dan juga ASEAN dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan hubungan

¹ Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional." ASEAN China Free Trade Area", dalam <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%FTA.pdf> (Diakses 27 Maret 2022)

² "Sejarah terbentuknya ACFTA dan Data Perdagangan Antar Negara , dalam <https://eprints.umm.ac.id/39778/3/BAB%20II.pdf> (Diakses 01 April 2022)

³ *ibid.*,

⁴ *ibid*

⁵ Sejarah terbentuknya ACFTA dan data perdagangan antar negara ,*loc.cit*

perdagangan dengan Cina, *ASEAN*, di mana Indonesia menjadi salah satu anggota-telah menyepakati kerjasama perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA. ⁶

Hal ini menjadi penanda bahwa ASEAN dan China benar-benar ingin memulai hubungan yang semakin kuat dalam bidang ekonomi. Langkah selanjutnya dilakukan penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* yang ditandatangani di Kamboja pada 4 November 2002, yang menjadi kerangka dasar isi perjanjian ACFTA.

Pada tahun 2003 hingga pada tahun 2006 dilakukan dua kali perubahan protokol Framework Agreement ACFTA yang di mana perubahan protokol pertama terjadi pada 6 Oktober 2003 ditandatangani di Bali dan perubahan kedua ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.⁷ Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA (ACFTA)* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.⁸

ACFTA merupakan kesepakatan antara negara negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.⁹ Dengan kata lain ACFTA merupakan kesepakatan antara Indonesia sebagai anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan Kawasan perdagangan bebas dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian. Indonesia pernah menolak untuk mendandatangani upgarding protocol ACFTA 2015. Namun sikap yang menolak meratifikasi *protocol to amend ACFTA (2015)* berakhir pada bulan November 2018. Dapat diketahui bahwa Indonesia memegang sikap ini selama lebih dari 3 tahun. Meskipun demikian, tindakan mengejutkan dilakukan Indonesia. Pada November 2018 Presiden Joko Widodo pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap "*Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements thereunder between ASEAN and the People's Republic of China (2015)*". Ratifikasi dilakukan oleh eksekutif yaitu Presiden karena Dewan Perwakilan Rakyat tidak merampungkan pembahasan dalam 60 hari sejak dokumen diserahkan, hal ini sesuai dengan pasal 84, paragraph 04, UU No 7/2014 tentang perdagangan. Fenomena ratifikasi oleh Indonesia ini tentu menarik, dimana Pertama Indonesia satu-satunya negara yang menunda ratifikasi tersebut; Kedua, sikap penolakan Indonesia kemudian diubah dengan justru melakukan ratifikasi pada tahun 2018.

⁶ *ibid.*,

⁷ Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, *loc.cit.*

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*

Dari dua hal tersebut tentu menarik sekali karena pada akhirnya Indonesia meratifikasi terhadap protokol perubahan ACFTA tahun 2015¹⁰

Akhirnya ACFTA yang telah ditandatangani pada tanggal 12 November 2017 diimplementasikan pada tanggal 1 Agustus 2019 (*Upgrading Protocol ACFTA*).¹¹ Walaupun telah meratifikasi protokol perubahan *ACFTA*, penandatanganan pemberlakuan ACFTA dan diimplementasikan tetapi pemberlakuan *ACFTA* tersebut masih menimbulkan perbedaan pendapat. Banyak yang berpendapat optimis menerima pemberlakuan ACFTA sebagai sesuatu hal yang menguntungkan. Namun tidak sedikit pula yang skeptis dan pesimis terhadap pemberlakuan ACFTA karena dipandang merugikan Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Apakah ACFTA: Menguntungkan atau Merugikan Indonesia? Ditinjau dari Perspektif Neoliberalisme.

THEORITICAL FRAMEWORK

Kerangka teori (*theoretical framework*) adalah struktur yang dibangun berdasarkan telaah literatur ilmiah yang dapat dijadikan sebagai landasan logis bagi peneliti dalam melakukan suatu *study* yang sifatnya berhubungan langsung (*direct relevance*) dengan pokok/ fokus permasalahan. Teori yang dianalisis merupakan suatu kerangka yang sifatnya mendukung (*protagonistic*) atau yang bersifat ilmiah yang dapat dijadikan sebagai landasan logis bagi peneliti dalam melakukan suatu *study*.

Neoliberalisme merupakan salah satu teori klasik dalam ilmu hubungan internasional. Menurut sejarahnya, neoliberalisme merupakan salah satu perspektif turunan dari liberalisme yang saat ini ada dan muncul sebagai saingan (pesaing) utama dari perspektif neorealisme.¹² Akibatnya, neoliberalisme berkembang pada 1990-an sebagai sudut pandang baru yang terkonsentrasi pada sarana yang melaluinya organisasi non-pemerintah dan organisasi internasional negara dapat memajukan kerja sama internasional. Meskipun tidak bertahan sampai tahun 1990-an, ide-ide fundamental dan tesis neoliberalisme mulai terbentuk setelah Perang Dunia II sebagai hasil dari teori-teori yang memandang nilai kerja sama internasional¹³. Neoliberalisme adalah salah satu pendekatan teoritik atau perspektif utama dalam Hubungan Internasional yang menitikberatkan pada konsep rasionalitas dan perikatan atau contracting (Martin, 2007: 110).¹⁴ Ditilik dari sejarah kehadirannya, neoliberalisme merupakan salah satu varian turunan dari perspektif liberalisme yang hadir dan telah berkembang sebagai pesaing (contender) utama perspektif neorealisme.¹⁵

Ada empat turunan dari perspektif liberalisme masing-masing adalah liberalisme republican (*republican liberalism*), liberalisme sosiologi (*sociological liberalism*), liberalisme interdependen

¹⁰ “Alasan Indonesia meratifikasi Upgrading protocol to Amend *ACFTA* (2015)”, dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15422/05.%201%20bab1.pdf?sequence=5&isAllowed=y> (Diakses 19 April 2022)

¹¹ “*ACFTA* “dalam <https://ftacenter.kemendag.go.id/acfta>.(Diakses 20 April 2022)

¹² Komang Citra Pertiwi,*loc.cit.*

¹³ *ibid.*,

¹⁴ *ibid.*,

¹⁵ *ibid.*,

atau komersial (*interdependence/commercial liberalism*), dan liberalisme institusional (*institutional liberalism*). Varian terakhir ini juga disebut neoliberal institutionalism atau lebih dikenal dengan neoliberalisme (*neoliberalism*)¹⁶. Mengarahkan perhatian kita kepada peranan sentral institusi dan organisasi di dalam percaturan politik global (Martin, 2007: 110).¹⁷ Prinsip utama yang disokong neoliberalisme berangkat dari cara melihat realitas lingkungan politik dan ekonomi internasional yang pada dasarnya sangat terinstitusionalisasi, dan organisasi internasional memainkan peran penting dalam hal distribusi internasional kesejahteraan dan kekuasaan (Martin, 2007: 110). Menurut kaum neoliberalis, meskipun perubahan memang terjadi akibat distribusi kekuasaan dalam sistem internasional, institusi internasional tetap bertahan (*the durability of institutions*). Kaum neoliberalis selanjutnya juga melihat institusi sebagai mediator dan alat mencapai kerjasama antaraktor di dalam sistem internasional (Lamy, 2001: 189).¹⁸

Di atas prinsip utama tersebut maka Steven Lamy (2001: 189-190) setidaknya mencatat adanya empat asumsi dasar yang menjadi pijakan kerangka berpikir neoliberalisme, sekaligus titik tolak menawarkan preskripsi mengenai stabilitas dan perdamaian internasional.¹⁹

Pertama, bahwa negara adalah aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi bukan satu-satunya aktor yang berpengaruh; negara adalah aktor yang rasional atau instrumental dan mempunyai kecenderungan memaksimalkan kepentingannya dalam berbagai isu.

Kedua, dalam lingkungan yang kompetitif, negara berusaha mendapat keuntungan yang absolut melalui kerjasama, dimana perilaku rasional mendorong negara mencari nilai lebih melalui jalan kerjasama, walaupun negara juga tidak terlalu hirau dengan keuntungan yang diperoleh negara lain melalui kesepakatan kerjasama.

Ketiga, hambatan terbesar terhadap kesuksesan kerjasama adalah ketidakpatuhan atau kecurangan. Untuk itu kehadiran organisasi internasional menjadi penting adanya untuk tidak saja menjamin tercapainya kpatuhan tetapi juga menghindari terjadinya kecurangan.

Keempat, kerjasama tidak pernah berjalan tanpa masalah, tetapi negara akan mengalihkan loyalitas dan sumber-sumber yang dimilikinya kepada institusi jika pengalihan ini menguntungkan semua pihak, serta institusi menyediakan peningkatan kesempatan bagi negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya pada level internasional.

Jika neorealis tidak begitu optimis dengan kehadiran institusi karena tidak mempunyai kekuatan memberi sanksi kepada yang melakukan pelanggaran, neoliberalis sebaliknya melihat, negara justru akan mendapat jauh lebih banyak keuntungan melalui kerjasama daripada tidak bekerjasama. Menurut kaum neoliberalis, institusi dan rejim internasional sangat penting, sebab melalui institusilah prinsip-prinsip, norma, aturan-aturan, serta prosedur-prosedur pengambilan keputusan dapat memfasilitasi kerjasama antarnegara. Perilaku dapat dibatasi norma dan aturan rejim-rejim yang ada, sementara keberadaan rejim dan institusi meningkatkan stabilitas dalam konteks sistem internasional yang anarki. Institusi dan rejim membuka peluang transparansi bagi setiap negara anggotanya, dan dengan begitu mengurangi beban transaksi serta dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh negara lain. Pengalaman bekerjasama melalui institusi, umumnya menghasilkan berbagai bentuk kesamaan (*new forms of commonality*) yang dalam prosesnya menjadi sumber kekuatan yang menjaga keberlangsungan kerjasama.²⁰

¹⁶ *ibid.*, h.107

¹⁷ *ibid.*, h.111

¹⁸ *ibid.*, h.112

¹⁹ *ibid.*, h.113

²⁰ *ibid.*, h.116

Neoliberalisme mengenai kompleksitas interdependens sistem internasional. Mengutip Keohane dan Nye (1977) yang dimaksudkan dengan situasi internasional yang serba saling tergantung (*complex interdependence*) ialah situasi politik global dimana semua aktor baik aktor negara maupun aktor bukan negara saling tergantung satu-sama-lain. Saling tergantung (*interdependence*) merujuk ke situasi dimana efek timbal-balik antarnegara atau antar-aktor di negara yang berbeda (Keohane & Nye, 1977: 8).²¹

Hubungan antar-aktor baik negara maupun bukan negara di dalam situasi saling tergantung ini bersifat kooperatif dan kompetitif. Dengan demikian kebijakan dan tindakan satu aktor mempunyai dampak yang mendalam terhadap aktor lainnya. Kerjasama di dalam sistem yang kompleks ini dilakukan dengan dasar untuk kepentingan bersama. Terdapat tiga karakteristik utama dari situasi *complex interdependence*, yaitu saluran penghubung yang jamak (*multiple channels*), tidak adanya hirarki antar-isu (*absence of hierarchy among issues*), dan peran kekuatan militer yang kecil (*minor role of military force*) (Keohane & Nye, 1977).²²

Karakter pertama merujuk pada situasi dimana dalam hubungan internasional terdapat banyak saluran yang menghubungkan masyarakat, termasuk semua negara, antarpemerintah, dan transaksi-transaksi lintas negara. Di dalam dunia yang kompleks ini, tidak hanya interaksi formal dan informal antar-elit pemerintahan yang menjadi sumber yang menghubungkan masyarakat, tetapi juga termasuk hubungan informal antar elit-elit non-pemerintah dan organisasi lintas negara yang lambat laun semakin penting juga. Hal serupa juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan multinasional serta korporasi-korporasi global yang semakin banyak jumlahnya. Secara keseluruhan dan secara bersama-sama aktor-aktor ini berperan sebagai sabuk penyambung (*transmission belts*), membuat kebijakan di berbagai negara menjadi semakin sensitif satu-sama-lain.

Karakter kedua merujuk pada keadaan dimana tidak ada hirarki antar satu isu dengan isu lainnya. Tidak juga ada pembatas yang jelas antar isu-isu yang ada, termasuk antara isu domestik dan internasional. Akibatnya ialah antara isu politik, militer dan keamanan, ekonomi, serta social tidak lagi dapat dengan mudah dikatakan mana yang lebih penting.

Karakter ketiga merupakan implikasi dari karakter pertama dan kedua, dimana saling ketergantungan dalam berbagai isu membuat pilihan cara-cara militer untuk memecahkan persoalan bukan lagi menjadi prioritas utama sebagaimana yang umumnya dikemukakan oleh kaum Neorealis.²³

Untuk dapat bekerjasama, Keohane (1982) menekankan pentingnya negara-negara mampu mengatasi sejumlah problem bersama, yang umumnya berakar pada perhitungan-perhitungan beban transaksi. Di dalam situasi demikian, tidak ada dorongan dari kekuatan luar yang dapat diharapkan berfungsi di dalam sistem internasional, sehingga setiap kesepakatan haruslah atas dorongan dari diri-sendiri. Itu berarti setiap negara harus mencari berbagai cara untuk menghindari godaan terjadinya kecurangan, dan diperlukan ketersediaan informasi mengenai intensi dan preferensi masing-masing negara. Disamping itu, di dalam rangka bekerjasama, negara-negara juga perlu mengkoordinasikan aksi-ksinya. Di dalam konteks inilah kehadiran organisasi dan bentuk-bentuk institusi internasional menjadi penting untuk dapat memitigasi aksi-aksi kolektif yang dapat mengancam kestabilan kerjasama.²⁴

Adapun alasan bagi setiap negara untuk bekerjasama dapat bervariasi. Tetapi salah satunya ialah karena adanya kondisi saling membutuhkan, yang mendorong negara-negara saling

²¹ *ibid.*,

²² *ibid.*,

²³ *ibid.*,h.117

²⁴ *ibid.*,h. 118

berhubungan secara terus menerus (Mingst, 2003: 64-65). Di tingkat global, kehidupan internasional mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, kebudayaan, hingga politik serta pertahanan dan keamanan. Keragaman ini memunculkan beraneka-ragam masalah dan kepentingan yang membutuhkan kerjasama untuk menemukan solusi-solusi.²⁵

Di dalam situasi hubungan internasional yang kompetitif, negara akan berusaha memaksimalkan capaiannya (*gains*). Untuk itu negara-negara akan semaksimal mungkin berupaya bekerjasama agar mendapatkan keuntungan tanpa perlu mengorbankan pihak lain. Situasi interdependensi, Neoliberalisme akan dengan sendirinya tercipta setelah kerjasama telah terjalin dengan sangat erat. Dalam keadaan seperti ini, interdependensi mendorong masing-masing negara mengkalkulasi betul kemungkinan kerugian yang didapat jika mereka tidak melakukan kerjasama²⁶

Menurut kaum neoliberalis, karena masalah keamanan adalah masalah yang serius dan penting, maka perlu dibentuk institusi, melalui mana stabilitas dan keamanan kemungkinan dapat dijaga, dan ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pihak negara yang dari sisi kapabilitas militer lemah (Mingst 2003:65). Jadi neoliberalisme berusaha menghilangkan potensi-potensi konflik melalui institusi internasional sebagai instrumen utamanya dan institusi dalam hal ini berperan sebagai wadah untuk menjalin kerjasama. Dengan begitu maka sebagai suatu perspektif, neoliberalisme berupaya menciptakan perdamaian melalui kerangka kerjasama yang dikelola dalam sebuah institusi formal yang saling menguntungkan. Dengan berbagai keuntungan, semua pihak atau aktor internasional akan menjauhkan diri dari sikap unilateralisme dan lebih mementingkan aspek keuntungan bersama. Karena pendekatan neoliberalis cenderung menekankan kemungkinan kemenangan bersama, maka negara lebih tertarik pada lembaga atau institusi yang dapat menyediakan perjanjian yang menguntungkan semua pihak.²⁷

Berbeda dengan neorealisme yang skeptis terhadap kerjasama dibawah sistem internasional yang anarki, neoliberalisme justru melihat adanya peluang kerjasama terutama melalui fasilitasi institusi internasional. Kerjasama, dalam kondisi-kondisi tertentu, dapat berkembang dengan dasar pertimbangan kepentingan yang saling menguntungkan. Organisasi internasional dan bentuk-bentuk institusi internasional lainnya dapat menjadi media yang memfasilitasi terjalinnya kerjasama antarnegara yang saling menguntungkan itu²⁸

GAMBARAN UMUM TENTANG ACFTA

Situasi perekonomian dunia telah memasuki era baru yaitu era perdagangan bebas. Dengan adanya era perdagangan bebas tersebut, negara-negara maupun organisasi internasional mulai mengimplementasikan bentuk-bentuk perjanjian perdagangan bebas. Salah satu kesepakatan yang sangat penting bagi perekonomian regional dan internasional yaitu ditandatanganinya perjanjian perdagangan bebas ACFTA. Kerja sama ASEAN-Cina telah dimulai secara informal pada tahun 1991. Cina dikukuhkan menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada ASEAN Ministerial Meeting ke-29 di

²⁵ *ibid.*,

²⁶ *ibid.*,h.118-119

²⁷ *ibid.*,h.119

²⁸ *Ibid.*, h.120-121

Jakarta tahun 1996.²⁹ Kerja sama kemitraan ASEAN dan Cina semakin meningkat ditandai dengan diadopsinya berbagai dokumen penting, antara lain:³⁰

1. *Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of the Southeast Asian Nations and the People's Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity* pada KTT ke-7 ASEAN-China di Bali, tahun 2003.
2. *Plan of Action of the ASEAN-China Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity* di Vientiane, tahun 2004.
3. *Joint Statement of ASEAN-China Commemorative Summit* di Nanning, tahun 2006.

China merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi dunia, telah menjadi mitra dagang terpenting Indonesia dan juga ASEAN. Untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan Cina, ASEAN dan Indonesia menjadi salah satu anggota-telah menyepakati kerjasama perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA. Dalam kerangka perjanjian tersebut, negara-negara yang menjadi anggota perjanjian saling memberikan preferential treatment di tiga sektor: sektor barang, jasa dan investasi dengan tujuan memacu percepatan aliran barang, jasa dan investasi diantara negara-negara anggota sehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Preferential *treatment* adalah perlakuan khusus yang lebih menguntungkan dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada negara mitra dagang lain non anggota pada umumnya. Dalam kesepakatan di sektor barang, komponen utamanya adalah preferential tarif.³¹ Awal kerjasama perdagangan dalam skema *Free Trade Area* antara China dan ASEAN tidak baru saja dimulai saat menggagas pembentukan ACFTA. Kerjasama itu sendiri diawali dengan ikut bergabungnya China di dalam ASEAN *Ministerial Meeting* (AMM) pada tahun 1991 sebagai salah satu mitra dialog ASEAN.³²

Pada tahun 1996, China kembali menjadi mitra dialog bagi ASEAN pada AMM ke 29 tahun 1996 di Jakarta. AMM sendiri membahas berbagai isu, seperti isu ekonomi, isu politik dan juga isu keamanan. Pada tahun 1997, China mulai bereperan aktif untuk ikut terlibat dalam hubungan kerjasama antara ASEAN dan juga tiga negara Asia Timur yaitu Jepang, China dan Korea Selatan, yang disebut ASEAN+3 (APT). KTT ASEAN+3 pertama kali dilaksanakan pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, di mana pada saat itu kawasan Asia sedang mengalami krisis ekonomi.³³ Pembentukan APT digagas oleh Presiden Korea Selatan saat itu, Kim DaeJung, yang memberikan saran untuk memperluas anggota kelompok kawasan ekonomi bersama Jepang, China dan Korea Selatan dalam ASEAN+3. Tujuan pembentukan ASEAN+3 juga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian ASEAN yang pada tahun 1997 hampir seluruh negara-negara ASEAN mengalami krisis ekonomi. Tidak hanya itu, motivasi pembentukan ASEAN+3 juga untuk mengikuti cepatnya laju globalisasi

²⁹ “Kerjasama ASEAN dan Mitra Wicara “dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/118/halaman_list_laiknya/kerjasama-asean-dan-mitra-wicara, (Diakses 26 April 2022)

³⁰ *ibid.*,

³¹ Sigit Setiawan, “ASEAN -China FTA : Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan Cina “, *ASEAN-China FTA: The Impacts on The Exports of Indonesia and China*”, dalam , https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_01.%20asean-china%20fta%20dampak%20ekspor.pdf,(Diakses 13 Mei 2022)

³² Bambang Cipto, 2007, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 75-76.

³³ . PTRI ASEAN, “*ASEAN Plus Three*”, Kementrian Luar Negeri Indonesia., dalam ,<http://www.kemlu.go.id/ptri-asean/en/Pages/ASEAN-Plus-Three.aspx> (Diakses 19 Mei 2022)

dan juga agar setiap negara anggota APT mendapatkan keuntungan dari perkembangan wilayah ekonomi.³⁴

Dengan kata lain Hubungan antara ASEAN dan China mulai ditingkatkan lagi dengan membentuk kerjasama yang lebih komprehensif di bidang ekonomi dalam sebuah kerjasama perdagangan bebas yang disebut ACFTA. Hal ini menjadi penanda bahwa ASEAN dan China benar-benar ingin memulai hubungan yang semakin kuat dalam bidang ekonomi. Langkah selanjutnya dilakukan penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* yang ditandatangani di Kamboja pada 4 November 2002, yang menjadi kerangka dasar isi perjanjian ACFTA. Antara ASEAN dan China membentuk kesepakatan atas dasar saling menguntungkan dan melakukan kerjasama ekonomi dalam bidang Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan produk kehutanan, Informasi dan Komunikasi Teknologi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata, Kerjasama Industri, Transportasi, Hak Kekayaan Intelektual, Usaha Kecil Menengah, Lingkungan Hidup dan Bidang lainnya yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi dan lainnya.

Pembentukan ACFTA juga didasarkan kepada keinginan China untuk menjalin hubungan baik terhadap negara-negara yang bergabung di dalam *ASEAN*. Kebangkitan China sebagai *New Emerging Power* di berbagai aspek seperti militer hingga bidang ekonomi menjadi sebuah ketakutan baru bagi negara-negara ASEAN atas adanya hegemoni China yang begitu kuat, sehingga perjanjian perdagangan bebas merupakan cara teraman dan terbaik bagi China untuk berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara *ASEAN*. ACFTA secara resmi terbentuk setelah penandatanganan perjanjian *China-Asean Free Trade Area* pada KTT ASEAN tahun 2007 di Filipina. Meskipun *ACFTA* telah terbentuk pada tahun 2007, realisasi pelaksanaan perjanjian baru dimulai pada awal tahun 2010 memiliki tujuh negara anggota yaitu, Malaysia, Filipina, China, Singapura, Thailand, dan Indonesia, Brunei Darussalam. Pada tahun 2012, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja baru mulai bergabung dengan ACFTA.³⁵ Akhirnya ACFTA yang telah ditandatangani pada tanggal 12 November 2017 diimplementasikan pada tanggal 1 Agustus 2019 (*Upgrading Protocol ACFTA*).³⁶

TUJUAN ACFTA

Pembentukan ACFTA merupakan perjanjian perdagangan yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam *The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dan juga China. Salah satu tujuan membentuk ACFTA adalah untuk menjadikan kawasan perdagangan bebas dengan mengurangi hingga menghilangkan hambatan dalam perdagangan, baik hambatan tarif maupun non-

³⁴ Yum K. Kwan, & Larry D. Qiu, 2010, "The ASEAN+3 Trading Bloc", *Journal of Economic Integration*, Vol. 25, No. 1, Seoul : Sejong Institution, Sejong University, h. 2.

³⁵"*CAFTA* : Sejarah, tujuan dan program ", 15 Desember 2020, dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/15/090000869/cafta---sejarah-tujuan-dan-program> (Diakses 27 Mei 2022)

³⁶"*ACFTA* "dalam <https://ftacenter.kemendag.go.id/acfta,loc.cit>

tarif menjadi 0%. Selain itu juga untuk membuka akses pasar jasa dan juga investasi untuk meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan negara yang bergabung di dalam ACFTA³⁷

Berdasarkan tujuan di atas maka ACFTA dibentuk adalah untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan yang berupa tarif maupun non tarif. Tujuan dalam jurnal Strategi China dalam pelaksanaan *China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA)* (2006) karya Anastasia Laura dkk, pembentukan CAFTA bertujuan untuk :³⁸

1. Meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota
2. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa
3. Menciptakan sistem transparansi perdagangan
4. untuk mempermudah pengawasan Meningkatkan daya saing pasar industri

Indonesia juga memanfaatkan pangsa pasar China dan ASEAN sebagai tujuan komoditas ekspor unggulan untuk meningkatkan pendapatan negara. Pemberlakuan kebijakan perdagangan bebas, ACFTA yang ditandatangani sejak 4 November 2002 dan berlaku efektif 1 Januari 2010. Mulai 1 Januari 2010 Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan China. Produk-produk impor dari ASEAN dan China akan lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tarif, serta tarif akan menjadi nol persen dalam jangka waktu tiga tahun. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara ASEAN dan China. Dalam perjanjian itu pula menyepakati pelaksanaan liberalisasi penuh pada tahun 2010 terhadap enam negara ASEAN termasuk Indonesia dengan China. Menyusul di 2015, juga akan berlaku bagi negara ASEAN lainnya yakni Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar.³⁹ Kemudian ACFTA ditandatangani pada tanggal 12 November 2017, dan diimplementasikan pada tanggal 1 Agustus 2019 (*Upgrading Protocol ACFTA*).⁴⁰

MANFAAT UTAMA ACFTA

Beberapa manfaat utama ACFTA yang dapat diketahui adalah :

1. Penghapusan tarif untuk 94,6% dari semua jalur tarif untuk ekspor asal Indonesia ke China.
2. Memungkinkan pengiriman barang bolak-balik di negara-negara anggota. Barang-barang asal ACFTA yang dibawa ke Indonesia dari negara-negara ASEAN atau China dan diekspor kembali ke negara-negara tersebut, tanpa pemrosesan di Indonesia, dapat menikmati konsesi tarif. Produk asal yang melewati Para Pihak juga dapat mempertahankan status asalnya.
3. Mengizinkan faktur barang pihak ketiga: Otoritas pabean di negara pengimpor dapat menerima Surat Keterangan Asal ketika faktur penjualan dikeluarkan dari negara atau perusahaan lain yang mengekspor barang asal di berbagai sektor, asalkan barang tersebut memenuhi persyaratan yang diperlukan. Faktur ini dapat berasal dari negara-negara yang bukan Pihak dalam Perjanjian ini.

³⁷ Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, "*ASEAN-China Free Trade Area* ", Diterbitkan oleh Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional pada Februari 2010, dalam <http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>, (Diakses 28 Mei 2022)

³⁸ "*CAFTA : Sejarah, tujuan dan program* ", *loc.cit.*

³⁹ Nugroho,SBM, "Pro Kontra Perdagangan Bebas *ASEAN China (ACFTA)* ", Media Ekonomi Dan Manajemen, Vol.24 No.2 Juli 2011 dalam <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/177/238> (Diakses 08 Juni 2022)

⁴⁰"*ACFTA* "dalam <https://ftacenter.kemendag.go.id/acfta/>,(Diakses 09 Juni 2022)

4. Memungkinkan untuk Kumulasi Regional : Bahan baku asal yang bersumber dari Negara Anggota ASEAN lainnya dan China dapat diperhitungkan saat menilai kriteria asal produk akhir yang diproduksi di Indonesia. Hal ini memudahkan produk eksportir Indonesia untuk memenuhi kriteria perlakuan istimewa.
5. Aturan Asal Produk Spesifik yang Disempurnakan (PSR) lebih liberal, fleksibel, dan ramah bisnis, dan memungkinkan bisnis memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat di bawah ACFTA dengan lebih mudah.
6. Melindungi akses pasar dan memastikan lingkungan operasi yang lebih dapat diprediksi untuk pemasok layanan. Akses pasar yang lebih besar dan peningkatan ambang batas ekuitas asing di enam sektor jasa China.
7. Perlindungan bagi investor dan investasi di ASEAN dan China. Ini menciptakan lingkungan yang lebih transparan, fasilitatif, dan aman bagi investor.
8. Ketentuan Kerjasama Ekonomi dan Kerjasama Teknis yang diperluas terkait dengan berbagi informasi dan peningkatan kapasitas memungkinkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kemampuan mereka.⁴¹

ACFTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEOLIBERALISME : MENGUNTUNGKAN INDONESIA

Perjanjian *Free Trade Area* antara ASEAN dengan Negara-negara Mitra Wicara telah mengalami kemajuan. Begitupula dengan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Dari sejumlah *Free Trade Area* ASEAN dengan mitra Wicara, ACFTA telah memberlakukan secara penuh sejak 1 Januari 2010.⁴² ACFTA juga memberikan sinyal yang positif bagi dunia internasional untuk menggerakkan roda perekonomian dunia, khususnya di tengah krisis ekonomi global. ACFTA juga dapat menjadi *counter balance* bagi pengaruh negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, India dan Korea Selatan. Dengan melihat potensi yang ada pada ASEAN dan China maka akan menjadi salah satu dari 3 (tiga) *Free Trade Area* yang terbesar di dunia setelah NAFTA, Uni Eropa.⁴³ Dengan diberlakukannya ACFTA, Kawasan ASEAN dan China termasuk Indonesia akan memahami tujuan investasi menjadi salah satu daya tarik ACFTA.

Keuntungan ACFTA dapat kita lihat dari potensi besar yang dimiliki oleh kedua Kawasan (ASEAN -China), yaitu :⁴⁴

1. Jumlah penduduk Cina sangat besar yaitu 1,9 Milyar atau sepertiga penduduk dunia,
2. PDB sebesar USD 6 triliun,
3. Tingkat pertumbuhan rata-rata 30%,
4. Estimasi total nilai perdagangan sebesar USD 1,23 triliun

Bagi Indonesia dan anggota ASEAN lainnya, ACFTA memiliki keuntungan, yaitu:

1. Akan mengurangi ancaman perekonomian dari China,
2. Indonesia akan memiliki akses untuk dapat masuk ke pasar domestik China yang begitu besar dan luas,

⁴¹ "ACFTA", *loc. cit.*

⁴² Djauhari Ortamangun, Dirjen Kerjasama ASEAN, "Keuntungan yang diperoleh dari ACFTA lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya", 15 Agustus 2011, Tabloid Diplomasi, dalam <https://www.tabloiddiplomasi.org/keuntungan-yang-diperoleh-dari-acfta-lebih-besar-dibandingkan-dengan-kerugiannya/> (Diakses 16 Juni 2022)

⁴³ *ibid*

⁴⁴ *ibid*

3. Biaya transaksi perdagangan dapat diturunkan sehingga terjadi efisiensi ekonomi
4. ACFTA akan memberikan peluang peningkatan ekspor dengan tingkat tarif yang lebih rendah
5. Terjadi peningkatan kerjasama antara pelaku bisnis melalui pembentukan “Aliansi Strategis” akses pasar jasa, pasar regional, pasar global, arus investasi dan terbukanya transfer teknologi ⁴⁵
6. Bagi Indonesia, China merupakan tujuan ekspor ke-5 setelah Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Singapura
7. Jumlah perusahaan China yang berinvestasi di Indonesia tercatat lebih dari 700 perusahaan (di bidang energi, telekomunikasi, listrik, pertambangan , keuangan dan asuransi) ⁴⁶

Dengan adanya Kebangkitan China sebagai *New Emerging Power* di berbagai aspek seperti militer hingga bidang ekonomi menjadi sebuah ketakutan baru bagi negara-negara ASEAN atas adanya hegemoni China yang begitu kuat, sehingga perjanjian perdagangan bebas merupakan cara teraman dan terbaik bagi China untuk berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara ASEAN. ACFTA dapat menciptakan integrasi ekonomi dan regional melalui peningkatan laju perdagangan di antara anggotanya. Liberalisasi perdagangan dan integrasi tersebut juga mampu menciptakan liberalisasi investasi dari negara-negara ASEAN dan China ke Indonesia. Selain itu, dengan terbentuknya ACFTA, Indonesia akan mudah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat yang belum diproduksi di Indonesia serta membuka peluang masuknya produk global ke dalam pasar domestik.

Dengan adanya perubahan dunia yang begitu cepat yang disebut dengan globalisasi menimbulkan implikasi yang sangat kompleks, yaitu munculnya saling ketergantungan (*interdependence*) dalam hampir seluruh dimensi kehidupan dalam hubungan antar negara dan hubungan transnasional. ⁴⁷ Regionalisme dengan blok-blok ekonomi yang ada antara ASEAN-China mau tidak mau dapat menerima dan mencoba bertahan dengan terpaan badai globalisasi dengan cara memperkuat Kerjasama ACFTA. Dalam kaitannya dengan globalisasi ini di mana dibutuhkan dukungan dan Kerjasama antara pihak pemerintah dengan pemerintah lain dan dengan MNC (*Multinational Corporations*) baik itu tertuang dalam wadah kerjasama ekonomi regional dalam Kawasan ASEAN, Uni Eropa ⁴⁸ Dengan pemberlakuan ACFTA, Indonesia dapat menciptakan integrasi ekonomi dan regional melalui peningkatan laju perdagangan di antara anggotanya. In donesia juga mampu menciptakan liberalisasi investasi dari negara-negara ASEAN dan China ke Indonesia, Selain itu , Indonesia dapat menarik masuk investasi asing dari negara-negara ACFTA sehingga Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasi dari dunia internasional.sehingga dapat mencapai target dari pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Dengan ACFTA, Indonesia dapat membangun citra positif di bidang ekonomi dan perdagangan sehingga perekonomian dan perdagangan Indonesia dapat stabil dan layak untuk dilakukan investasi.

Perspektif Neoliberalisme dapat menjelaskan bahwa Di dalam situasi hubungan internasional yang kompetitif, negara akan berusaha memaksimalkan capaiannya (*gains*). Untuk itu negara-negara akan semaksimal mungkin berupaya bekerjasama agar mendapatkan keuntungan tanpa perlu mengorbankan pihak lain. Situasi interdependensi, Neoliberalisme akan dengan sendirinya tercipta setelah kerjasama telah terjalin dengan sangat erat. Dalam keadaan seperti ini, interdependensi

⁴⁵ *ibid.*,

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ Budi Winarno , *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru : Peran Negara dalam Pembangunan* , Tajidu Press ,Yogyakarta 2005,h.36

⁴⁸ T.May Rudy , *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global : Isu, Konsep , Teori dan Paradigma* ,Cetakan 1 , PT Refika Aditama,, Bandung 2003 h.37

mendorong masing-masing negara mengkalkulasi betul kemungkinan kerugian yang didapat jika mereka tidak melakukan kerjasama⁴⁹ Jadi berdasarkan Perspektif Neoliberalisme di dalam situasi hubungan internasional yang kompetitif seperti dalam ACFTA maka Indonesia akan semaksimal mungkin berupaya bekerjasama agar mendapatkan keuntungan tanpa perlu mengorbankan pihak lain . Begitupula dengan China dan anggota ASEAN lainnya dalam ACFTA akan selalu berupaya bekerjasama agar mendapatkan keuntungan tanpa perlu mengorbankan pihak lain . Oleh karena itu di dalam ACFTA dengan sendirinya akan tercipta situasi interdependensi ketika Kerjasama telah terjalin dengan erat. Dengan kata lain, ACFTA semaksimal mungkin akan berupaya menciptakan Kerjasama yang sehingga menghasilkan keuntungan tanpa mengorbankan pihak lain, bekerja sama dengan erat sehingga menciptakan situasi interdependensi. Dalam keadaan demikian akan mendorong masing-masing negara dalam ACFTA akan mengkalkulasi betul kemungkinan kerugian yang didapat jika mereka tidak melakukan kerjasama. Secara spesifik neoliberalisme memprioritaskan kerja sama internasional yang dapat diimplementasikan melalui organisasi, institusi dan lembaga internasional. Dalam neoliberalisme, sistem internasional bersifat kooperatif, negara lebih senang bekerja sama dibanding kompetisi, negara memilih bekerja sama karena menginginkan agar semua pihak mendapatkan keuntungan, dengan latar belakang bahwa setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda, maka negara dapat saling melengkapi. Negara anggota ASEAN dan China memprioritaskan Kerjasama internasional yang diimplementasikan melalui ACFTA seperti yang dijelaskan oleh Perspektif Neoliberalisme. ACFTA merupakan Kerjasama internasional antar negara-negara anggota ASEAN dan China yang bersifat saling menguntungkan seluruh pihak. Kerja sama yang ada dalam ACFTA akan menciptakan saling ketergantungan atau interdependensi ekonomi, perdagangan bebas menjadi kebijakan favorit atau yang paling diprioritaskan dalam hubungan ekonomi antar negara.

Oleh karena itu Perdagangan bebas dalam *ACFTA* akan menguntungkan. Menurut pembela perdagangan bebas, Martin Wolf, Perdagangan bebas merupakan cara paling baik dalam menciptakan pertumbuhan dan kemakmuran rakyat ⁵⁰ Berdasarkan Perspektif neoliberal institusionalisme sangat penting peranan dari sebuah institusi sebagai wadah untuk menjalin kerjasama. Berarti ACFTA sebagai institusi sangat penting sekali perannya sebagai wadah untuk menjalin kerjasama. Oleh karena kaum neoliberal institusionalisme percaya akan asumsi rasionalitas sehingga Negara sebagai aktor utama yang rasional akan lebih memilih bekerjasama daripada berkonflik, karena dengan kerjasama mereka saling mendapatkan keuntungan. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka akan tercipta interdependensi yang merupakan refleksi dari perdamaian. Indonesia, negara anggota ASEAN lainnya dan China merupakan Aktor rasional. Dikarenakan aktor rasional itu bersifat rasional maka ia akan melakukan kalkulasi untung dan rugi dalam mengambil suatu kebijakan yang mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Walaupun sudah ada pemberlakuan *ACFTA* sebagai institusi Kerjasama internasional masih menimbulkan perbedaan pendapat. Oleh karena masih banyak yang berpendapat optimis menerima pemberlakuan *ACFTA* sebagai sesuatu hal yang menguntungkan . Namun tidak sedikit pula yang skeptis dan pesimis terhadap pemberlakuan *ACFTA* karena dipandang merugikan Indonesia .

Sikap optimis dan pesimis keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian tersebut sangat jelas terasa. Pihak yang optimis menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam *ACFTA* tidak berarti ancaman serbuan produk produk China ke Indonesia, tetapi merupakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke China dan negara-negara *ASEAN* serta peluang tumbuhnya investor dari

⁴⁹ *ibid.*,h.118-119

⁵⁰ Budi Winarno , *Isu-Isu Global Kontemporer* , Cetakan 1, CAPS , Yogyakarta , 2011, h.35

negara-negara tersebut yang akan menanamkan modalnya di Indonesia guna membuka lapangan usaha baru untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia. Di samping itu, dengan adanya *ACFTA*, konsumen di Indonesia juga akan diuntungkan dengan adanya barang-barang yang lebih murah yang akan masuk ke Indonesia sehingga daya beli masyarakat akan naik.

Pandangan akan keuntungan yang didapatkan Indonesia dengan keikutsertaannya dalam *ACFTA* ini berbeda dengan pihak yang menentanginya (skeptis atau pesimis). Ada kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut bagi kelangsungan hidup industri lokal, khususnya industri mikro, kecil, dan menengah yang saat ini masih berjalan terseok-seok. Mereka menganggap bahwa saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah belum dapat menaikkan daya saing industri mikro, kecil, dan menengah di tengah kancan industri internasional, apalagi dengan adanya kebijakan baru dengan dibukanya pasar bebas tersebut sehingga ditakutkan industri mikro, kecil, dan menengah akan semakin terpuruk dan mati secara mengenaskan.⁵¹

ACFTA dipandang positif karena bisa memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Pertama, Indonesia akan memiliki pemasukan tambahan dari PPN produk-produk baru yang masuk ke Indonesia. Beragamnya produk China yang masuk ke Indonesia dinilai berpotensi besar mendatangkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Kedua, persaingan usaha yang muncul akibat *ACFTA* diharapkan memicu persaingan harga yang kompetitif sehingga pada akhirnya akan menguntungkan konsumen (penduduk / pedagang Indonesia). Sementara itu pemerintah tetap menjalankan kesepakatan dengan tetap mengkaji dan mengevaluasi berbagai hal untuk dapat tetap meningkatkan daya saing Indonesia antara lain terkait dengan prasarana, biaya ekonomi tinggi, biaya transportasi, dan sektor makro lainnya.⁵² Bahwa pemberlakuan *ACFTA* ini memberikan 2 (dua) sisi yaitu menguntungkan maupun merugikan. Namun demikian secara keseluruhan *ACFTA* memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya.⁵³

Indonesia haruslah yakin bahwa seperti yang dijelaskan oleh perspektif Neoliberalisme bahwa kerjasama internasional yang diimplementasikan melalui *ACFTA* merupakan Kerjasama internasional antar negara-negara anggota ASEAN dan China yang bersifat saling menguntungkan seluruh pihak. Kerja sama yang ada dalam *ACFTA* akan menciptakan saling ketergantungan atau interdependensi ekonomi, perdagangan bebas menjadi kebijakan favorit atau yang paling diprioritaskan dalam hubungan ekonomi antar negara. Oleh karena itu perdagangan bebas dalam *ACFTA* akan menguntungkan semua pihak .

Keanggotaan Indonesia dalam *ACFTA* bersifat menguntungkan. Indonesia dapat meraih angka impor dan ekspor meningkat yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada akhirnya Indonesia juga dapat mengembangkan Kerjasama terutama melakukan perdagangan dengan China, dan negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia sudah mampu mengikuti persaingan sehat dalam beberapa bidang perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Perdagangan bebas yang terjadi juga memperluas jangkauan kerja sama yang bisa dilakukan Indonesia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

⁵¹ Karjadi Mintaroem, “*ACFTA* ; berkah atau bencana bagi Indonesia” Februari 2010, dalam <https://economy.okezone.com/read/2010/02/23/279/306269/acfta-berkah-atau-bencana-bagi-indonesia> (Diakses 23 Juni 2022)

⁵² Restu Rachmawati, “ Menakar Kebijakan Perdagangan Bebas *ASEAN-China ACFTA* “ , Jurnal Polinter UTA’45 Jakarta , Vol. 1.No.1(2015) dalam <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/66/48> (Diakses 01 Juli 2022)

⁵³ Djauhari Ortamangun, Dirjen Kerjasama *ASEAN,loc.cit*

Dengan demikian, perspektif Neoliberalisme bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena hubungan perdagangan bebas yang menguntungkan antara negara - negara dalam satu kawasan, yakni ACFTA, karena bersifat mengutamakan kerja sama internasional. Peran ACFTA sebagai Institusi merupakan wadah untuk menjalin kerjasama sehingga negara sebagai actor rasional akan lebih memilih kerjasama daripada berkonflik karena dengan kerjasama Indonesia, anggota ASEAN lainnya serta China saling mendapatkan keuntungan, tercipta interdependensi yang merupakan refleksi dari perdamaian.

Menurut Neoliberalisme ACFTA dibentuk sebagai institusi yang sangat menguntungkan bagi Indonesia dan negara anggota lainnya. ACFTA sebagai Institusi berusaha untuk menghilangkan potensi konflik. Institusi ini juga berperan sebagai wadah untuk menjalin kerjasama, menciptakan perdamaian. Melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia lebih tertarik pada ACFTA yang dapat menyediakan perjanjian perdagangan yang menguntungkan semua pihak. Sebagai institusi, ACFTA memberikan keyakinan kepada Indonesia bahwa ACFTA sebagai institusi akan mengutamakan kerjasama internasional yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan semua anggota ACFTA .

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis jelaskan, bahwa Pemberlakuan *Free Trade Area* seperti ACFTA ini memberikan 2 (dua) sisi yaitu menguntungkan atau merugikan bagi Indonesia Namun demikian secara keseluruhan ditinjau dari Perspektif Neoliberalisme, ACFTA memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya. Perspektif neoliberalisme bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena hubungan perdagangan yang menguntungkan antara negara-negara dalam satu kawasan, yakni ACFTA, karena bersifat mengutamakan kerja sama internasional, menciptakan saling ketergantungan atau interdependensi ekonomi, perdagangan bebas menjadi kebijakan favorit atau yang paling diprioritaskan dalam hubungan ekonomi antara negara dalam ACFTA Berdasarkan perspektif Neoliberalisme maka dalam ada koneksitas antara Institusi, Kerjasama ekonomi, interdependensi dan Perdamaian. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah ditinjau dari Perspektif Neoliberalisme maka ACFTA terbukti menguntungkan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cipto,Bambang. (2007). *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Cresswell, John W. (1998). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, Thousand Oaks,CA: Sage Publications ,1998
- _____, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, London: SAGE Publications, 2009,
- Dugis, Vinsensio , *Bab 5 Neoliberalisme dalam Teori Hubungan Internasional : Perspektif - perseptif Klasik* , Cetakan 1 Desember 2016 , CSGS, PT Revka Petra Media
- May Rudy , T, *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global : Isu, Konsep , Teori dan Paradigma* ,Cetakan 1 , PT Refika Aditama,, Bandung 2003
- Winarno,Budi , *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru : Peran Negara dalam Pembangunan* , Tajidu Press ,Yogyakarta , 2005
- _____, *Isu-Isu Global Kontemporer* , Cetakan 1, CAPS , Yogyakarta , 2011

Artikel Jurnal:

“ACFTA “ dalam <https://ftacenter.kemendag.go.id/acfta>

“Alasan Indonesia meratifikasi *Upgrading protocol to Amend ACFTA* (2015)”, dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15422/05.%201%20bab1.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

“CAFTA : Sejarah, tujuan dan program “, 15 Desember 2020, dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/15/090000869/cafta---sejarah-tujuan-dan-program>

Djauhari Ortamangun, Dirjen Kerjasama ASEAN, “ “Keuntungan yang diperoleh dari ACFTA lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya “ , 15 Agustus 2011, Tabloid Diplomasi,dalam <https://www.tabloiddiplomasi.org/keuntungan-yang-diperoleh-dari-acfta-lebih-besar-dibandingkan-dengan-ierugiannya/>

Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional.” *ASEAN China Free Trade Area*”, dalam <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>

Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, “*ASEAN-China Free Trade Area* “, Diterbitkan oleh Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional pada Februari 2010, dalam <http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>

Karjadi Mintaroem , “ACFTA ; berkah atau bencana bagi Indonesia ” Februari 2010, dalam <https://economy.okezone.com/read/2010/02/23/279/306269/acfta-berkah-atau-bencana-bagi-indonesia>

“Kerjasama ASEAN dan Mitra Wicara “dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/118/halaman_list_lainnya/kerjasama-asean-dan-mitra-wicaran

Komang Citra Pertiwi, “Neoliberalisme : Analisis Dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN Terhadap Negara Indonesia “ dalam https://www.researchgate.net/profile/Komang-Pratiwi/publication/361923374_Neoliberalisme_Analisis_Dampak_Masyarakat_Ekonomi_ASEAN_terhadap_Negara_Indonesia/links/62ccfc84cab7ba7426e6ae89/Neoliberalisme-Analisis-Dampak-Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-terhadap-Negara-Indonesia.pdf

Nugroho,SBM, “Pro Kontra Perdagangan Bebas ASEAN China (ACFTA “) , Media Ekonomi Dan Manajemen, Vol.24 No.2 Juli 2011 dalam <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/177/238>

PTRI ASEAN, “*ASEAN Plus Three*”, Kementrian Luar Negeri Indonesia., dalam [,http://www.kemlu.go.id/ptri-asean/en/Pages/ASEAN-Plus-Three.aspx](http://www.kemlu.go.id/ptri-asean/en/Pages/ASEAN-Plus-Three.aspx)

Restu Rachmawati, “ Menakar Kebijakan Perdagangan Bebas ASEAN-China ACFTA “ , Jurnal Polinter UTA’45 Jakarta , Vol. 1.No.1(2015) dalam <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/66/48>

Sejarah terbentuknya ACFTA dan Data Perdagangan Antar Negara , dalam <https://eprints.umm.ac.id/39778/3/BAB%20II.pdf>

Sigit Setiawan, “*ASEAN -China FTA* : Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan Cina “, *ASEAN-China FTA: The Impacts on The Exports of Indonesia and China*”, dalam , https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_01.%20asean-china%20fta%20dampak%20ekspor.pdf

Yum K. Kwan, & Larry D. Qiu, 2010, “The ASEAN+3 Trading Bloc”, *Journal of Economic Integration*, Vol. 25, No. 1, Seoul : Sejong Institution, Sejong University